



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 190                      TAHUN : 1998                      SERI : D NO.  
187**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 76 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**RUMUSAN HASIL RAPAT KOORDINASI DAERAH  
(RAKORDA)  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN  
ANGGARAN 1997/1998**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang semaksimal mungkin dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah diadakan Rakorda Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada tanggal 28 Pebruari 1998;

b. bahwa untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk kerja bagi semua Instansi terkait di lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Bali maka hasil Rumusan RAKORDA tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah  
(Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3  
8; Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun  
1988 tentang  
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal  
di Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1988  
Nomor 10; Tambahan Lembaran  
Negara Republik  
Indonesia Nomor 3373);
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Bali  
Nomor 48 Tahun 1997 tentang  
penjabaran Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 1997/  
1998, kegiatan Paspas dan Proyek  
APBD Tahun  
Anggaran 1997/1998.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
RUMUSAN HASIL RAPAT KOORDINASI  
DAERAH (RAKORDA) PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN  
ANGGARAN 1997/1998

#### **Pasal 1**

Menetapkan Rumusan Hasil Rakorda Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana  
tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Hasil Rumusan Rakorda dimaksud pasal 1 dapat dijadikan  
sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan Tugas-tugas  
Pemerintahan dan Pembangunan sesuai dengan  
PeraturanPerundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 18  
Maret 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL  
18 MARET 1998 NOMOR 76 TAHUN 1998  
TENTANG RUMUSAN HASIL RAPAT  
KOORDINASI DAERAH (RAKORDA)  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998.**

**Hasil Rumusan Komisi I : Tantangan dan Peluang  
Tenaga Kerja Bali  
dalam Era AFTA Tahun 2003.**

**I. IDENTIFIKASI MASALAH**

1. Masih lemahnya pelaksanaan alih teknologi dari tenaga kerja Asing yang bekerja di Bali ke tenaga kerja Indonesia (dalam rangka pengidonesiaan TKA).
2. Kurangnya informasi tentang kebutuhan tenaga kerja sehingga menghambat penyusunan kebutuhan latihan dalam penyiapan tenaga kerja terampil, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran sebagian pengusaha untuk melaporkan lowongan yang ada.
3. Kurangnya kesadaran dari sebagian pengusaha untuk melaksanakan program pemagangan.
4. Masih kurangnya penguasaan Bahasa Asing oleh Tenaga Kerja Indonesia.

**II. PEMECAHAN MASALAH :**

1. Pelaksanaan penggantian TKA oleh Pengusaha dilaksanakan secara konsekwen.
2. Mengefektifkan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan ketenagakerjaan di Perusahaan.

3. Meningkatkan kemitraan/kerjasama dengan APINDO dan KADIN.
4. Perlu penambahan muatan lokal pelajaran Bahasa Asing dari jenjang pendidikan SD sampai dengan jenjang pendidikan tertinggi/ perguruan tinggi.

### **III. REKOMENDASI.**

1. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan oleh Tim Lintas Sektoral.
2. Agar Pemda mengintruksikan kepada Pengusaha untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980.
3. Tempat pemagangan di perusahaan diatur dengan Peraturan Daerah.
4. Pemberian pengertian yang terus menerus kepada anak didik sejak dari SD sampai perguruan tinggi tentang arti pentingnya Bahasa Asing dalam Era Globalisasi.

## **Hasil Rumusan Komisi II : Peranan Dolog dalam menjaga Stabilitas**

### **Sembako khususnya Beras di Daerah Bali.**

#### **I. IDENTIFIKASI MASALAH**

1. Produksi padi di Bali pada Tahun-tahun yang akan datang dikhawatirkan tidak mencukupi kebutuhan beras ada kecenderungan ketersediaan beras dari luar Daerah (Luar/Dalam Negeri).
2. Alih fungsi lahan sawah ke non pertanian masih terus berlanjut.
3. Semakin kompetitipnya pemanfaatan dan kebutuhan air untuk pertanian pangan dan Non pangan yang cenderung menurunkan produksi pangan.
4. Meningkatkan pendapatan perkapita selama ini ada kecenderungan diikuti oleh meningkatnya konsumsi beras yang semestinya justru menurunkan konsumsi beras.
5. Sampai Tahun IV Repelita VI Pertumbuhan PDRB Daerah Bali masih didominasi oleh sektor-sektor yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata yang sangat sensitif terhadap perkembangan dan stabilitas politik dalam negeri dan Luar Negeri (Kasus Perang Teluk, isu kolera isu siaga I, Deprisiasi Rupiah terhadap dolar serta Instabilitas Politik).

#### **II. PEMECAHAN MASALAH :**

1. a. Peningkatan dan pemantapan produktifitas tanaman padi.  
b. Meminimalkan kehilangan hasil panen padi.  
c. Optimalkan pemanfaatan lahan kering.
2. Menerapkan secara konsekwen Peraturan-peraturan yang ada dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUTR, RTRW, Kabupaten.
3. Perlu adanya persamaan persepsi terhadap aturan

yang mengatur masalah pemanfaatan air disemua sektor dan tingkatan Pemerintahan.

4. Peningkatan Upaya-upaya pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan dipersifikasi produksi dan konsumsi

pangan diluar beras.

5. Mengoptimalkan nilai tambah Sektor-sektor ekonomi yang mendukung kepariwisataan seperti pertanian, industri dan Jasa- jasa.

## **II. REKOMENDASI.**

1. a. Memantapkan mutu intensifikasi padi dengan penerapan 10 (sepuluh) unsur teknologi Insus/Suprainsus.  
b. Perbaiki penanganan panen dan pasca panen melalui teknologi tepat guna antara lain melalui pemakaian sabit bergerigi dan tersier.  
c. Mengintensipkan penanaman padi gogo dan palawija dilahan kering.
2. Setiap tahun diupayakan adanya program pemantapan pengawasan peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan ruang, dan memberikan kewenangan yang jelas bagi Aparatur pelaksana.
3. Meningkatkan koordinasi antara sektor terkait, dunia usaha dan masyarakat pemakai air/subak.
4. Secara kontinyu diprogram setiap tahun Kegiatan-kegiatan pembinaan dan penyuluhan dengan melibatkan Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat.
5. Peningkatan sumber pendapatan melalui upaya mengoptimalkan sumber yang ada dan menggali Sumber-sumber lain sehingga dapat mendukung pendapatan Daerah dan Pendapatan masyarakat.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :  
190 tanggal : 6 Nopember 1998 Seri  
: D Nomor : 187.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010026454



